

**DLHK Provinsi Banten Tegaskan Komitmen Integritas  
melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Anti Korupsi**



## Pendahuluan

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak dapat dilepaskan dari komitmen kuat seluruh aparatur negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Di tengah tantangan birokrasi modern yang menuntut pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, isu korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta mencederai nilai-nilai moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tanggung jawab besar ini menuntut setiap pegawai DLHK untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini menjadi fondasi utama dalam membangun budaya kerja yang bersih dan beretika.

Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, DLHK Provinsi Banten menyelenggarakan **Sosialisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Anti Korupsi** yang bertempat di Ruang Rapat DLHK Provinsi Banten pada **Rabu, 08 Oktober 2025**. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis DLHK untuk membangun pemahaman bersama di kalangan pegawai mengenai bahaya korupsi, bentuk-bentuk pelanggaran integritas, serta pentingnya peran individu dalam mencegah praktik-praktik yang menyimpang.

Melalui kegiatan ini, DLHK tidak hanya ingin menyampaikan pesan normatif mengenai larangan korupsi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan perilaku aparatur agar semakin berorientasi pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan mampu menjadi momentum

refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh pegawai DLHK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang berintegritas.

### **Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Anti Korupsi**

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Anti Korupsi diikuti oleh perwakilan dari setiap tim teknis, bagian keuangan, serta tim perencanaan dan evaluasi kinerja di lingkungan DLHK Provinsi Banten. Kehadiran para peserta dari berbagai unit kerja ini menunjukkan keseriusan DLHK dalam menjadikan pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas satu bidang atau unit tertentu.

Acara berlangsung dalam suasana tertib, interaktif, dan penuh antusiasme. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama, mulai dari pemaparan materi, diskusi, hingga sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengawasan internal pemerintahan, yaitu **Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten, Ibu Hj. Ratu Syafitri Muhayatt, SE.** Kehadiran beliau memberikan nilai tambah tersendiri bagi kegiatan ini, karena peserta memperoleh pemahaman langsung dari perspektif pengawasan dan pembinaan aparatur pemerintah daerah.

### **Pemberantasan Korupsi sebagai Tanggung Jawab Kolektif**

Dalam pemaparannya, Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau lembaga pengawasan semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh aparatur pemerintahan. Setiap pegawai, tanpa terkecuali, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Beliau menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, melalui sikap jujur, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas individu menjadi benteng pertama dalam mencegah terjadinya penyimpangan, baik yang berskala kecil maupun besar.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa korupsi seringkali bermula dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti kelalaian dalam administrasi, konflik kepentingan, atau toleransi terhadap pelanggaran kecil. Jika dibiarkan, praktik-praktik tersebut dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan sistemik. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai untuk memiliki keberanian menolak dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan.

### **Membangun Pegawai yang Berintegritas dan Profesional**

Materi sosialisasi difokuskan pada upaya membangun pegawai yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten menjelaskan berbagai bentuk perilaku koruptif yang rentan terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

Peserta diajak untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar anti korupsi, termasuk jenis-jenis korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, serta dampak negatifnya bagi organisasi dan masyarakat. Penjelasan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh-contoh konkret yang relevan dengan tugas dan fungsi DLHK.

Selain itu, dibahas pula pentingnya sistem pengendalian internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Pegawai diingatkan untuk selalu mendokumentasikan setiap proses kerja secara akurat dan akuntabel sebagai bentuk perlindungan diri sekaligus upaya menjaga kredibilitas instansi.

### **Peran Strategis DLHK dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Bersih**

Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya alam, DLHK Provinsi Banten memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Integritas aparatur menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Melalui sosialisasi ini, DLHK menegaskan posisinya sebagai instansi yang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. DLHK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai yang jujur dan berintegritas, serta tidak memberikan ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan bahwa DLHK siap melindungi dan mendukung pegawai yang bekerja sesuai aturan dan berpegang teguh pada etika profesional. Penilaian kinerja pegawai akan didasarkan pada prestasi, dedikasi, dan integritas, bukan pada intervensi atau kepentingan pribadi maupun kelompok.

### **Penguatan Budaya Organisasi Berbasis Integritas**

Sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan pegawai, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai integritas. Budaya kerja yang sehat akan mendorong terciptanya kolaborasi yang positif, komunikasi yang terbuka, serta rasa saling percaya di antara pegawai.

Dalam sesi diskusi, peserta diajak untuk berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas di lingkungan kerja. Berbagai masukan dan pengalaman yang disampaikan menjadi bahan refleksi bersama untuk terus memperbaiki sistem dan mekanisme kerja di DLHK.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai DLHK memiliki kesadaran yang sama bahwa menjaga integritas bukanlah beban, melainkan kehormatan dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Dengan integritas yang kuat, pegawai dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab.

## **Komitmen Bersama Menjaga Nama Baik Instansi**

Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk bersama-sama menjaga nama baik DLHK Provinsi Banten. Komitmen ini diwujudkan melalui tekad untuk menjalankan tugas dan fungsi secara jujur, transparan, dan akuntabel, serta menjauhi segala bentuk praktik korupsi

Pernyataan komitmen tersebut menjadi simbol keseriusan DLHK dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan dukungan seluruh pegawai, DLHK optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten.

## **Penutup**

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penyuluhan Anti Korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menjadi bukti nyata keseriusan institusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai upaya strategis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme kepada seluruh aparatur DLHK.

Melalui pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk dan risiko perilaku koruptif, pegawai diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta keteguhan sikap dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Kesadaran bahwa pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai diharapkan tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

DLHK Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk senantiasa melindungi dan mendukung pegawai yang bekerja secara jujur, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja yang berbasis prestasi dan integritas menjadi wujud nyata bahwa organisasi menghargai kerja keras, dedikasi, serta sikap profesional aparatur. Dengan sistem kerja yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan internal maupun publik terhadap DLHK terus meningkat.

Lebih dari itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari etos kerja. Budaya tersebut diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara konsisten, tidak hanya pada level individu, tetapi juga dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja. Sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Pada akhirnya, komitmen bersama yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi DLHK Provinsi Banten dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dan pengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Dengan menjadikan integritas sebagai nilai utama, DLHK optimistis dapat terus berkontribusi positif dalam pembangunan daerah, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi demi masa depan Provinsi Banten yang lebih baik dan berkelanjutan.